

etika birokrasi dalam pelayanan publik

by Kridawati Sadhana

Submission date: 25-Jun-2020 04:48PM (UTC+0700)

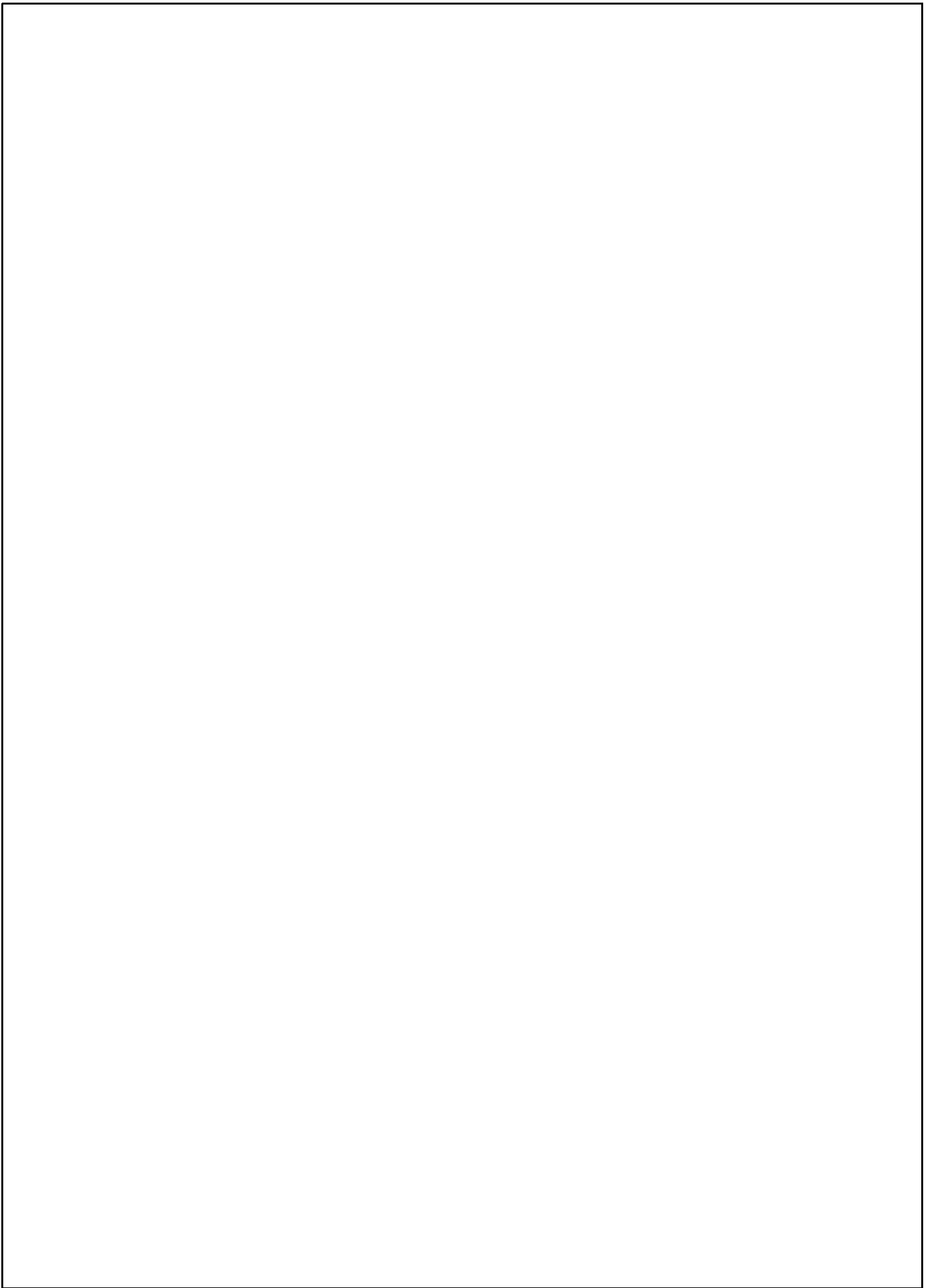
Submission ID: 1349461174

File name: BUKU_ETIKA_BIROKRASI.pdf (2.93M)

Word count: 62466

Character count: 409504

**Etika Birokrasi
dalam
Pelayanan Publik**



ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dr. Kridawati Sadhana, M.S



Sadhana

Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik—Oleh: Dr. Kridawati Sadhana,
M.S—Cet. I,—Malang: Penerbit Citra Malang, 2010.

x, 378 hlm; 21 cm

ISBN: 979-907-075-9

• **ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Dr. Kridawati Sadhana, M.S

- Diterbitkan oleh:

PENERBIT PERCETAKAN CV. CITRA MALANG

Anggota IKAPI No. 015/JTI/98

Jl. Perum Sumpersari Baru 27 Malang 65146

115

- Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.
-

- Cetakan I: 2010
-

KATA PENGANTAR

72

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Konsepsi Kepemerintahan yang baik menuntut setiap Aparatur Pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakannya kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; dilandasi semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik, pengayoman dan pemberdayaan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang demikian akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan (*supporting and trusting*).

Salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika merupakan konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral, menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah (*code of conduct*). Sedangkan produk akhir dari birokrasi adalah pelayanan publik. Sehingga etika merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan menjadi ukuran kepuasan publik yang dilayani sekaligus ukuran keberhasilan organisasi pelayanan publik. Selama ini, literatur mengenai etika dan pelayanan publik selalu diulas secara partial dan terpisah.

Karena itu, Buku *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* merupakan sebuah terminologi yang berusaha menempatkan dan menjelaskan korelasi serta keterkaitan antara etika, pelayanan publik dan birokrasi. Terminologi yang berusaha mengungkapkan apa, mengapa, bagaimana dan untuk apa etika birokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini didorong oleh adanya kesadaran akan kenyataan bahwa dewasa ini tuntutan masyarakat semakin beragam, sementara sumber daya birokrasi yang dimiliki sangat terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Administrasi publik dituntut untuk mampu menjawab berbagai tantangan dari persoalan-persoalan yang ada.

Buku ini disusun dalam suatu kerangka pikir yang simpel dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas birokrasi, tugas-tugas pelayanan publik seperti aparatur pemerintah. Selain itu, buku ini dapat dipakai sebagai salah satu referensi dalam diskusi dan pembelajaran mengenai *Good Governance*.

Penulis meyakini bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan dimasa datang.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin!

Malang, Juni 2010

Kridawati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN: APA ITU ETIKA	1
1. Konsep Etika	1
2. Pendekatan Etika dalam Administrasi Publik	8
3. Konsep Perkembangan Moral	20
4. Sifat Nilai Moral: Relativitas/kenisbian	27
5. Karakteristik Nilai Moral	31
6. Pertimbangan Etis	34
7. Kebenaran Etis	38
BAB II ¹⁷⁴ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK	41
1. Konsep Etika Administrasi Publik	44
2. Hirarki Etika Dalam Pelayanan Publik	49
3. Konsep Legitimasi Kekuasaan	54
4. Etika: Aplikasi dan Pengembangannya ..	66
BAB III BIROKRASI INDONESIA	81
1. Konsep Birokrasi	81
2. Karakteristik Birokrasi	89

	3. Wajah Birokrasi Indonesia dari Masa ke Masa	94
	4. Budaya Politik dan Budaya Birokrasi	101
	5. Fungsi Birokrasi	112
	6. Model - Model Birokrasi	119
BAB IV	PELAYANAN PUBLIK (<i>PUBLIC SERVICE</i>)	127
	1. Konsep Pelayanan Publik	127
	2. Asas dan Standar Pelayanan Publik	134
	3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik	138
	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan	143
	5. Karakteristik Pelayanan Publik	146
	6. Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik	150
	7. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	152
BAB V	ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK	159
	1. Pendahuluan	159
	2. Implementasi Etika dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia	163
	3. Peran Strategis Pemerintah dalam Pelayanan Publik	172
	4. Nilai dan Prinsip Etika Pelayanan Publik	176

5. Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik	183
6. Cara Meningkatkan Perilaku Etis	192
7. Perubahan Birokrasi: menuju <i>Good Governance</i>	194
BAB VI REFORMASI BIROKRASI:	
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK	199
1. Mengapa Perlu Reformasi Birokrasi?	199
2. Hakikat Reformasi Birokrasi	206
3. Upaya Reformasi Birokrasi	211
4. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi	222
5. Reformasi Birokrasi: Menuju Pelayanan Prima	238
BAB VII GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI (Refleksi Implementasi Good Governance dalam Otonomi Daerah	267
1. Konsep <i>Good Governance</i>	267
2. Makna <i>Good</i> dalam <i>Good Governance</i> ..	272
3. Karakteristik dan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	275
4. Birokrasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	283

5. Birokrasi dan Responsivitas Pelayanan Publik	297
6. Birokrasi dan Transparansi Pelayanan Publik	300
7. Birokrasi dan Pelayanan Partisipatif	302
8. <i>Good Governance</i> dan <i>Good Local Governance</i>	304
BAB VIII KORUPSI DAN MANIPULASI	309
1. Pendahuluan	309
2. Konsep Korupsi dan Manipulasi	314
3. Korupsi dan <i>Mal-administration</i>	320
4. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Korupsi	327
5. Jenis-Jenis Korupsi	333
6. Bentuk-bentuk Praktek Korupsi	336
7. Strategi Memberantas Korupsi	347
BAB IX DILEMA ETIKA.....	353
Datar Pustaka	369

BAB I

PENDAHULUAN: APA ITU ETIKA

1. Konsep Etika

Di tengah akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, upaya pelestarian peradaban dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang rasional dan obyektif mutlak dilakukan. Untuk itu diperlukan kaidah – kaidah moral sebagai *role expectation* untuk menjaga agar proses sosial dapat berjalan tertib, utamanya dengan semakin kompleksnya interaksi antar-individu dalam komunikasi sejagad (global).

Role expectation merupakan acuan yang menentukan apakah sikap, perilaku dan tindakan kita sesuai dengan hukum moral. Ukurannya benar dan salah, baik dan buruk akan terlihat pada reaksi masyarakat atau *environment* sosial yang ada. Sehingga etika pada hakikatnya tidak mempersoalkan keadaan manusia secara fisik tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Untuk itu, perlu merumuskan aturan-aturan /kaidah-kaidah yang disepakati bersama oleh masyarakat. Norma – norma tersebut senantiasa adaptif dengan dinamika sosial yang selalu berubah seiring dengan arah perkembangan manusia.

Dalam banyak tulisan istilah etika, moral dan moralitas seringkali digunakan secara bergantian, dengan kata lain jarang sekali penulis menggunakan istilah tersebut secara konsisten. Meskipun etika dan moral tersebut hampir sama, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Sebelum membicarakan perbedaannya, kita tinjau terlebih dahulu pengertian etika dan moral itu.

Istilah “ etika “ berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*. Kata *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti : tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang ; kebiasaan, adat ; akhlak, watak ; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ta etha*, artinya adat kebiasaan. Dalam arti jamak inilah yang kemudian melatarbelakangi terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (384 – 322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Secara etimologis “ etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan etimologi kata “moral” yang berarti adat kebiasaan. Walaupun bahasa asalnya berbeda; “etika” dari bahasa Yunani, sedang “moral” dari bahasa Latin yaitu *mor* atau *mores* (Bertens, 2004:4)

Etika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan studi tentang prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan moral. De George sebagaimana dikutip oleh Denhardt (1991:101) mendefinisikan Etika sebagai berikut : *Ethics is a systematic attempt through the use of reason to make sense of our indivi-*

Pendahuluan: Apa itu Etika

dual and social moral experience in such a way as to determine the rules which ought to govern human conduct (Etika adalah suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan penalaran untuk memberikan arti bagi pengalaman-pengalaman moral pribadi dan sosial untuk menentukan aturan-aturan yang menuntun perilaku manusia). Atau John P. Noman SJ¹ mengatakan bahwa “*Ethics is the science of the morality of human acts*” (Etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari moralitas dari perbuatan – perbuatan manusia. Sedangkan *morality* adalah “*the goodness or badness, the rightness or wrongness of human acts* . Jadi etika mempelajari sikap, tingkahlaku dan tindakan (perbuatan) manusia tentang yang baik dan buruk, benar dan salah yang mempergunakan norma – norma atau ukuran nilai sebagai kriterianya.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa etika berkaitan dengan proses yang menjelaskan apa yang benar dan yang salah dan menuntun kita bertindak berdasarkan apa yang kita anggap benar. Etika juga berkaitan dengan penggunaan nalar dalam menentukan suatu tindakan yang benar. Etika berusaha menentukan suatu standar moral. Moral berkaitan dengan praktek-praktek dan kegiatan-kegiatan yang dianggap benar atau salah. Moral juga berkaitan dengan nilai-nilai yang dicerminkan oleh praktek-praktek tersebut dan atur-

¹ General and Special Ethics, 1972 , hlm.1 dalam Wijaya, 2004 , hlm. 56

an-aturan yang menuntun pelaksanaan praktek-praktek tersebut dalam situasi tertentu.

Moral suatu masyarakat, sebuah sistem politik atau organisasi publik berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah dalam kelompok itu. Moral menyatakan nilai-nilai tertentu yang dianggap penting oleh anggota-anggota kelompok tersebut dan dicerminkan di dalam hukum, peraturan, kebijakan atau prosedur. Tindakan moral adalah tindakan yang konsisten dengan moral kelompok, yang menyatakan komitmen yang paling mendasar dari kelompok itu tentang apa yang benar dan yang salah.

Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan "sistim nilai"; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan "kode etik"; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut "filsafat moral". Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam *The Encyclopedia of Philosophy* yang menggunakan etika sebagai (1) *way of life*; (2) *moral code atau rules of conduct*, (Denhardt, 1988).

Dari uraian diatas tampak bahwa etika dan moral hampir sama dan digunakan saling bergantian misalnya kita menyebut suatu tindakan yang benar secara moral sebagai tindakan etis.

Pendahuluan: Apa itu Etika

Juga sebaliknya kita menyebut kode perilaku moral sebagai kode etik. Namun untuk mengetahui perbedaan etika, moral dan moralitas itu penting tidak hanya karena alasan-alasan filosofis tetapi juga karena fokusnya, sebagaimana dikemukakan oleh Solomon (dalam Kumurotomo, 2001,6) bahwa Etika merujuk kepada dua hal yaitu:

1. Etika berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang dari filsafat.
2. Etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai yang hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Maka moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya, yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Orang yang mengikari janji yang telah diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya atau tidak etis tetapi

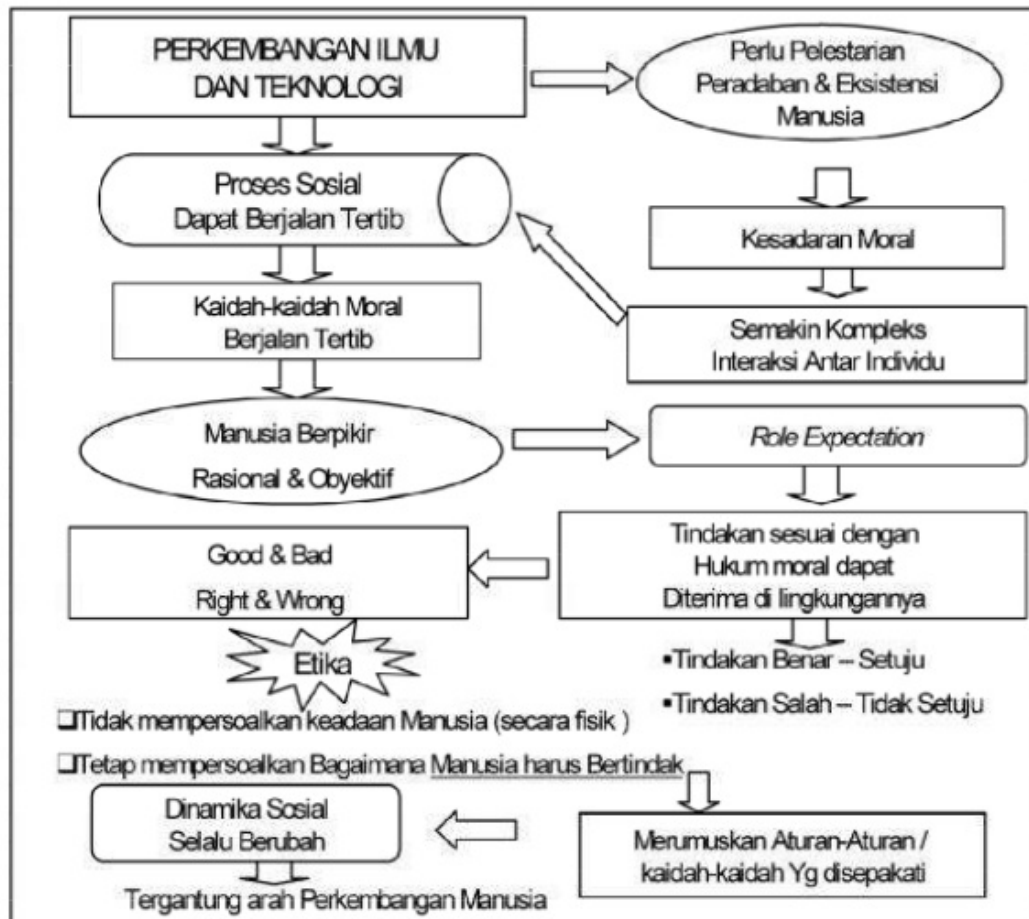
bukan berarti tidak bermoral, tekanannya disini adalah pada unsur keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Walaupun secara epistemologis etika, moral dan moralitas memiliki pengertian yang sama namun ketiganya dapat dibedakan. De Vos (2002:1) mengatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral. Sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Etika lebih banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral yang menjadi landasan bertindak seseorang yang mempunyai profesi tertentu (disebut kode etik). Moral lebih tertuju pada perbuatan orang secara individual; mempersoalkan kewajiban manusia sebagai manusia. Disini jelas bahwa keterkaitan antara etika dan moral sangatlah erat, walaupun terdapat sedikit perbedaan.

Moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai sejauh mana seseorang memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Dalam hal ini latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman dan karakter individu adalah sebahagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang. Tingkat moralitas ini tidaklah diukur perbedaannya secara hitam putih, tetapi diukur dari kadar atau kuat tidaknya dorongan seseorang itu untuk mencari kebenaran atau kebaikan. Jadi sekali lagi moralitas berkenaan dengan nilai-nilai etika dan moral yang terdapat di dalam hati nurani seseorang beserta internalisasi nilai-nilai itu dalam dirinya.

Pendahuluan: Apa itu Etika

Alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Jadi, etika merupakan suatu konsep yang mampu menjabarkan apa yang terdapat didalam moral. Menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah. Etika juga dipandang sebagai Ilmu yang mencari orientasi (atau apa yang harus dilakukan, mempunyai sebuah tujuan dan target), serta etika berusaha dalam menentukan suatu standar moral.

2. Pendekatan Etika Dalam Administrasi Publik

Ada 2 pendekatan yang secara umum digunakan dalam etika administrasi yaitu Utilitarianism dan Deontology. Pendekatan Utilitarianism sebenarnya merupakan salah satu kategori pendekatan dalam kelompok pendekatan teleologis, disamping pendekatan *ethical egoism*.²

Pertama pendekatan **teleologi**. Pendekatan teleologi terhadap etika administrasi berpangkal tolak bahwa apa yang baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi. Acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan diperoleh atau dihasilkan, yakni baik atau buruk dilihat dari konsekuensi keputusan atau tindakan yang diambil. Dalam konteks administrasi publik pendekatan teleologis mengenai baik dan buruk itu, diukur antara lain dari pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik (seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan), pemenuhan pilihan-pilihan masyarakat atau perwujudan kekuasaan organisasi, bahkan kekuasaan pererangan kalau itu menjadi tujuan dari administrasi.

Pendekatan ini juga terdiri atas berbagai kategori, antara lain (dua yang utama), yaitu pertama, adalah *ethical egoism*, yang berupaya mengembangkan kebaikan bagi dirinya. Pelopor pendekatan ini yang amat dikenal adalah Niccolo Machiavelli, seorang birokrat Itali (Florensia) pada abad ke -15,

² Ginandjar Kartasasmita dalam Administrasi Pembangunan (1997:27)

Pendahuluan: Apa itu Etika

yang menganjurkan bahwa kekuasaan dan *survival* pribadi adalah tujuan yang benar untuk seorang administrator pemerintah; *kedua*, adalah *utilitarianism*, yang pangkal tolaknya adalah prinsip kefaedahan (*utility*), yaitu mengupayakan yang terbaik untuk sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini sudah berakar sejak lama, terutama pada pandangan-pandangan abad ke-19, antara lain dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mills.

Di antara keduanya yaitu *egoism* dan *utilitarianism*, tidak terdapat jurang pemisah yang tajam karena merupakan suatu kontinum, sehingga di antaranya dapat ditempatkan, misalnya pendapat Weber bahwa seorang birokrat sesungguhnya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri pada waktu ia melaksanakan perintah atasannya, yang oleh Chandler (1994) disebut sebagai "*a disguise act of ego*". Namun, dalam masa modern dan pasca modern ini, pandangan *utilitarianism* atau kelompok pendekatan teleologis ini memperoleh lebih banyak perhatian. Dalam pandangan ini yang amat pokok adalah bukan memperhatikan nilai-nilai moral, tetapi konsekuensi dalam keputusan dan tindakan administrasi itu bagi masyarakat³. Ke-

³ Misalnya, membunuh bertentangan dengan nilai yang amat mendasar dalam moral, tetapi membunuh musuh (bahkan dalam situasi tertentu sebanyak-banyaknya, dengan menjatuhkan bom atom, misalnya) dibenarkan karena yang menjadi pertimbangan adalah apa yang ingin dicapai dari tindakan itu. Contoh lain adalah bahwa tidak semua kebenaran dapat diumumkan oleh pemerintah kepada masyarakat karena bisa merugikan, misalnya hubungan dengan negara lain, atau sesuatu yang sedang diperjuangkan, atau yang dapat menimbulkan gejolak apabila dikemukakan. Di sini perbuatan untuk tidak berbicara sejujurnya, yang bertentangan dengan etika, dibenarkan, karena konsekuensi dari berbicara yang sebenarnya akan berakibat buruk bagi kepentingan umum.

pentingan umum (*public interest*) merupakan ukuran penting menurut pendekatan ini. Di sini pun ditemui pula berbagai masalah.

1. Siapa yang menentukan apakah sesuatu sasaran, ukuran, atau hasil yang dikehendaki didasarkan pada kepentingan umum, dan bukan kepentingan si pengambil keputusan sendiri, atau kelompoknya, atau kelompok yang ingin diuntungkan⁴.
2. Di mana letak batas antara hak perorangan dengan kepentingan umum. Jika kepentingan umum mencerminkan dengan mudah kepentingan banyak individu, maka masalahnya sederhana⁵. Namun, jika ada perbedaan tajam antara keduanya, maka akan timbul masalah⁶.
3. Bagaimana membuat perhitungan yang tepat bahwa langkah-langkah yang dilakukan akan menguntungkan kepentingan umum dan tidak merugikan. Hal ini penting oleh karena kekuatan dari pendekatan (*utilitarianism*) ini adalah bahwa dalam neracanya harus diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan kerugian yang sekecil-kecilnya, untuk

⁴ Nicholas Henry, menyatakan: "Public administrators do make political decisions, but no effective moral and philosophic guidelines exist for their making these decisions in the public interest."

⁵ Misalnya, upaya mengendalikan inflasi, dengan kebijakan memperketat jumlah uang beredar. Kebijakan publik seperti itu akan mengakibatkan naiknya suku bunga, sehingga memberatkan beban dunia usaha, tetapi hasil yang akan diperoleh, yaitu stabilitas ekonomi, mencerminkan kepentingan yang lebih luas.

⁶ Misalnya, dalam beberapa kasus pembebasan tanah di daerah-daerah, seperti Waduk Nipah di Madura

Pendahuluan: Apa itu Etika

kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Atau dengan kata lain efisiensi⁷.

Secara ringkas, pendekatan *Utilitarianism* berpendapat bahwa suatu tindakan itu benar apabila mendatangkan manfaat yang paling besar bagi banyak orang. Menurut pandangan penganut pendekatan ini, tidak ada prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan pedoman suatu tindakan. Manfaat dan biaya yang berkaitan dengan setiap tindakan harus dihitung untuk menilai apakah tindakan itu bermoral atau tidak. Penganut pendekatan ini mengatakan bahwa suatu kebenaran tidak dapat secara apriori dinilai benar atau salah. Benar atau salahnya suatu kebenaran tergantung pada perhitungan siapa yang dibantu dan siapa yang dirugikan oleh tindakan itu. Tindakan-tindakan itu sendiri tidak memiliki nilai-nilai intrinsik, tindakan-tindakan itu hanya merupakan alat untuk mencapai hal-hal yang memiliki nilai. Contoh: Membangun jalan raya yang melewati suatu lingkungan tertentu dan merepotkan orang banyak tetapi memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang, maka pembangunan jalan raya tersebut dianggap seba-

⁷ Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh konsep kita sendiri di Indonesia. Deregulasi dan debirokratisasi akan meningkatkan efisiensi, karena itu adalah perbuatan yang baik atau benar. Tetapi, dengan langkah itu yang kuat akan makin kuat daya saingnya dan yang lemah bisa makin lemah kalau dibiarkan begitu saja. Akibatnya terjadi kesenjangan yang melebar. Pertimbangan baik buruk di sini haruslah memperhitungkan aspek-aspek tersebut, yang mungkin akan menghasilkan kesimpulan perlu dilakukannya upaya lain yang akan menutupi kerugian tersebut. Misalnya, dengan program-program kebijakan pemberdayaan untuk memperkuat daya saing lapisan masyarakat yang lebih lemah

gai tindakan yang benar. Dalam hal ini administrator tidak mengikuti suatu prinsip moral yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi akan menghitung biaya dan manfaat suatu kasus khusus, tidak secara umum.

Salah satu jawaban yang juga berkembang adalah apa yang disebut pilihan publik, suatu teori yang berkembang atas dasar prinsip-prinsip ekonomi. Pandangan ini berpangkal pada pilihan-pilihan perorangan (*individual choices*) sebagai basis dari langkah-langkah politik dan administratif. Memaksimalkan pilihan-pilihan individu merupakan pandangan teleologis yang paling pokok, dengan mengurangi sampai sekecil mungkin biaya atau beban dari tindakan kolektif terhadap individu. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; bahwa ada konflik dalam pilihan-pilihan tersebut, sehingga persoalan bagaimana mengelola konflik-konflik itu merupakan tantangan pokok bagi administrasi dalam merancang dan mengelola badan – badan dan program-program publik.

Pendekatan *kedua* adalah *Deontology*, dari kata Yunani yang berarti tugas (*duty*). Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan ⁶⁹ karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat. Kathryn G. Denhardt (1988), mengatakan “*Organizations and their members must*

Pendahuluan: Apa itu Etika

not be moral only where it is efficient to do so, they must be efficient only where it is moral to do so". Pendekatan ini pun memiliki pandangan yang variatif. Yang amat mendasar adalah pandangan yang bersumber pada falsafah Immanuel Kant (1724-1809), yaitu bahwa moral adalah imperatif dan kategoris, yang tidak membenarkan pelanggaran atasnya untuk tujuan apa pun, meskipun karena itu masyarakat dirugikan atau harus jatuh korban⁸. Ada pula pandangan relativisme dalam moral dan kebudayaan, yang menolak kekakuan dan absolutisme dalam memberi nilai pada moral.

Menurut pandangan ini suatu peradaban atau kebudayaan akan menghasilkan sistem nilainya sendiri, yang dapat tetapi tidak harus selalu sama dengan peradaban atau kebudayaan lain⁹

Dari pokok pikiran tersebut berkembang pandangan-pandangan yang disebut *situationism* yang bertentangan dengan paham *universalism*. *Situation ethics* ini intinya adalah bahwa determinan dari moralitas yang ditetapkan berkaitan dengan situasi tertentu¹⁰

⁸ Contoh yang sering dibicarakan; berbohong untuk melindungi nyawa seseorang. Menurut pandangan ini, dengan tujuan apa pun berbohong tidak bisa dibenarkan

⁹ Banyak contoh mengenai hal ini. Misalnya, poligami diterima di sebagian masyarakat seperti di dunia Islam, atau poliandri di masyarakat Hindu tertentu, tetapi di dunia lain tidak diterima.

¹⁰ Rohr menjelaskannya sebagai berikut: "*One of the perennial questions in the history of ethics has been whether particular moral principles are based on nature or convention. Is morality something of man's own making, something that differs from age to place and are rooted in man's being? In the ancient world, Plato reported Socrates' rigorous inquiry into this problem and Sophocles' Antigone has immortalized the problem in verse. Medieval men carried on the debate with the pithy Latin phrase: *malum quia prohibitum aut prohibitum quia malum*. That is, is something evil because it is prohibited or is it prohibited because it is evil? The contemporary version of the debate is frequently couched in terms of "situation ethics"*".

Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan bahwa prinsip-prinsip yang luas tentang benar dan salah dapat dibentuk dan bahwa prinsip-prinsip ini tidak tergantung pada akibat suatu tindakan tertentu. Penganut pendekatan ini cenderung berfokus pada tugas-tugas atau tanggungjawab seseorang yaitu melakukan sesuatu yang secara moral benar dan menghindari tindakan yang secara moral salah, tanpa memperdulikan akibat dari suatu tindakan. Dengan menggunakan pendekatan deontology, seorang administrator akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima secara umum, misalnya tentang kejujuran. Administrator diharapkan mengatakan kebenaran dengan menepati janji yang telah diucapkannya. Dalam hal ini mereka bertindak bukan berdasarkan hukum atau kode etik tetapi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diterima secara umum. Dalam situasi tertentu tindakan ini mungkin merugikan kepentingan organisasi tetapi karena tindakan itu dapat dibenarkan sebab konsisten dengan aturan moral yang diterima secara umum, administrator merasa wajib bertindak demikian.

Dalam prakteknya, memasukkan nilai-nilai moral ke dalam administrasi, merupakan upaya yang tidak mudah, karena harus mengubah pola pikir yang sudah lama menjiwai administrasi, seperti yang dicerminkan oleh paham utilitarianisme. Oleh karena administrasi dipahami sebagai usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan, maka pencapaian tujuan itu merupakan nilai utama dalam administrasi. Fox (1994), menge-

Pendahuluan: Apa itu Etika

tengahkan tiga pandangan yang menggambarkan pendekatan deontologi dalam etika administrasi.

Pertama, pandangan mengenai keadilan sosial, yang muncul bersama berkembangnya “Administrasi Negara Baru” (antara lain Frederickson dan Hart, 1985)¹¹. Menurut pandangan ini administrasi negara haruslah secara proaktif mendorong terciptanya pemerataan atau keadilan sosial (*social equity*). Mereka melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh administrasi negara modern adalah adanya ketidakseimbangan dalam kesempatan sehingga mereka yang kaya, memiliki pengetahuan, dan terorganisasi dengan baik, memperoleh posisi yang senantiasa menguntungkan dalam negara. Karena itu, administrasi haruslah membantu yang miskin, yang kurang memiliki pengetahuan dan tidak terorganisasi. Pandangan ini cukup berkembang, meskipun di dunia akademik banyak juga penganteriknya.

Kedua, apa yang disebut *regime values* atau *regime norms*. Pandangan ini terutama bersumber dari Rohr (1989), yang berpendapat bahwa etika administrasi negara harus mengacu kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini ia merujuk kepada konstitusi Amerika yang harus menjadi landasan etika para administrasi di negara itu. *Ketiga*, tatanan moral universal atau *universal moral order* (antara lain Denhardt, 1988, 1991). Pandangan

¹¹ Pandangan ini tidak lepas dari pengaruh John Rawls (1971), dengan “*Theory of Justice*”nya yang menjadi rujukan dari berbagai teori pemerataan dan keadilan sosial.

ini berpendapat bahwa ada nilai-nilai moral yang bersifat universal yang harus menjadi pegangan bagi administrator publik. Masalahnya, nilai-nilai moral itu sendiri banyak yang dipertanyakan karena beragamnya sumbernya dan juga kebudayaan serta peradaban.

Terkait dengan itu, belakangan ini banyak kepustakaan etika administrasi yang membahas dan mengkaji etika kebajikan (*ethics of virtue*). Etika ini membahas tentang karakter yang dikehendaki dari seorang administrator. Hal ini (konsep ini) merupakan koreksi terhadap paradigma yang berlaku sebelumnya dalam administrasi, yaitu etika sebagai aturan (*ethics as rules*), yang dicerminkan dalam struktur organisasi dan fungsi-fungsi serta prosedur, termasuk di dalamnya sistem insentif dan disinsentif dan sanksi-sanksi berdasarkan aturan¹². Pandangan etika kebajikan bertumpu pada karakter individu. Pandangan ini seperti juga pandangan “Administrasi Negara Baru” bersumber dari konferensi Minnowbrook di New York pada akhir dasawarsa 1960-an, yang ingin memperbaharui dan merevitalisasi bidang studi administrasi negara. *Ethics of virtue* (berisi nilai-nilai kebajikan) yang diharapkan dapat

¹² Antara lain D.K. Hart (1994) mengungkapkannya sebagai berikut: “.. *For too long, the management orthodoxy has taken as axiomatic the proposition that “good systems will produce good people,” and that ethical problems will yield to better systems design. But history is clear that a just society depends more upon the moral trustworthiness of its citizens and its leaders than upon structures designed to transform ignoble actions into socially useful results. Systems are important, but good character is more important. As a result, management scholars and practitioners are giving increasing attention to administrative ethics...*”

Pendahuluan: Apa itu Etika

mengendalikan peran seseorang di dalam organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Tantangan berikutnya adalah menemukan apa saja nilai-nilai kebajikan itu, atau lebih tepatnya lagi nilai-nilai mana yang pokok (*cardinal values*), dan mana yang menjadi turunan (*derivative*) dari nilai-nilai pokok itu. Frankena (1973) misalnya, mengatakan bahwa hanya ada dua kebajikan pokok (*cardinal virtues*), yaitu *benevolence* dan *justice*. Semua nilai kebajikan lain bersumber dari kedua nilai utama itu¹³. Hart mengatakan bahwa kebajikan pokok itu adalah *eudaimonia* dan *benevolence*.¹⁴

Sehingga administrator yang bajik (*virtuous administrator*) adalah orang yang berusaha, seperti dikatakan oleh Hart (1995) agar kebajikan menjadi sentral dalam karakternya sendiri, yang akan membimbingnya dalam perilakunya dalam organisasi. Selain itu, administrator yang bajik berkewajiban moral untuk mengupayakan agar kebajikan juga menjadi karakter

¹³ Ia mengatakan “many moralists, among them Schopenhauer, have taken benevolence and justice to be the cardinal moral virtues, as I would. It seems to me that all of the usual virtues (such as love, courage, temperance, honesty, gratitude, and considerateness), at least insofar as they are moral virtues, can be derived from these two”.

¹⁴ Yang dimaksud dengan eudamonia menurut Hart adalah konsep bahwa “all individuals are born with unique potentialities and the purpose of life is to actualize them in the world. These potentialities involve, first, moral virtues and, second, our unique individual talents. With respect to morality, eudaimonia cannot involve harming either self or others, as the prefix “eu”, or “good,” makes clear.” Sedangkan benevolence diartikannya sebagai “the love of other”.

mereka yang bekerja di bawahnya. Namun, dinyatakan pula bahwa kebajikan tidak bisa dipaksakan kepada yang lain karena kebajikan harus berasal dari diri masing-masing individu (*voluntary observance*). Ia menekankan bahwa “*virtue does not yield to social engineering.*” Pada bagian ini, Hart menyetujui pentingnya pendidikan mengenai kebajikan sejak dini, serta dilancarkannya kebijakan-kebijakan program, praktek-praktek yang mendorong berkembangnya nilai-nilai kebajikan dalam organisasi. Dan yang teramat penting adalah keteladanan. Ia sendiri mengakui bahwa tidak ada orang yang dapat mencapai tingkat kebajikan yang ideal, maka dalam etika kebajikan yang penting adalah proses untuk menginternalisasikan nilai – nilai dibandingkan dengan hasilnya. Penekanannya pada proses internalisasi nilai, atau enkulturasi nilai.

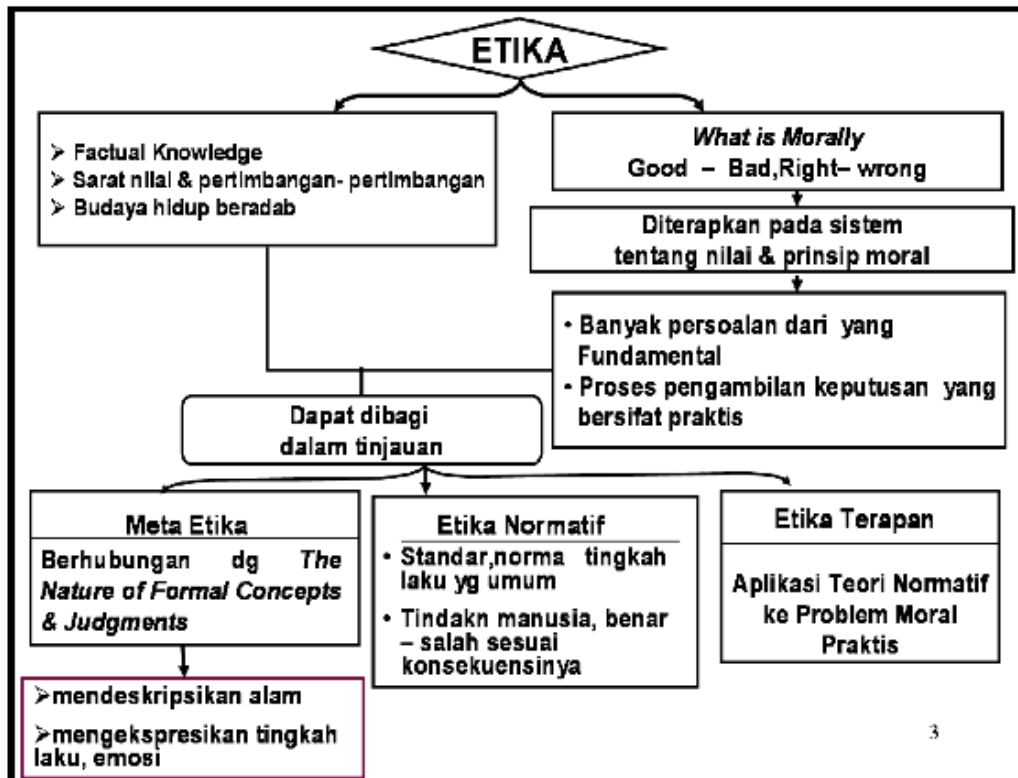
Berbicara mengenai etika dalam organisasi, sejumlah pakar membedakan antara etika perorangan (*personal ethics*) dan etika organisasi. Etika perorangan menentukan baik atau buruk dalam perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisasi. Etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban (*obligations*) organisasi, dan konteks tempat keputusan-keputusan etika perorangan itu dibentuk (Vasu, Stewart, Garson, 1990). Dua hal penting bagi para pengkaji organisasi yaitu memahami lebih dalam hakikat etika perorangan dan etika organisasi serta interaksinya. Nilai-nilai kebajikan tersebut adalah etika per-

Pendahuluan: Apa itu Etika

orangan yang harus dimiliki siapa saja, tidak terkecuali, bahkan terutama harus dimiliki oleh mereka yang menjadi pengabdian masyarakat (*public servants*).

Selain itu, penting juga membahas etika profesional. Etika profesional lebih sempit dibandingkan dengan etika perorangan yang berlaku buat semua. Dalam menganalisis etika perorangan dari kaca mata ilmu administrasi, Rohr (1983) membaginya dalam kelompok metaetika (studi mengenai dasar-dasar linguistik dan epistemologis dari etika), etika umum (prinsip-prinsip mengenai benar dan salah), dan etika khusus. Etika khusus dibaginya lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Dalam etika khusus ini ia memasukkan etika profesional.

Etika profesional berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, etika profesional berlaku dalam suatu kerangka yang diterima oleh semua yang secara hukum atau secara moral mengikat mereka dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Etika profesional pada profesi tertentu dilembagakan dalam apa yang umum disebut kode etik. Misalnya, kode etik untuk dokter, guru, hakim, pengacara, wartawan, arsitek, pegawai negeri, periklanan dan sebagainya. Kode etik itu ada yang diperkuat oleh sistem hukum, atau mengikat secara sosial dan secara kultural, sehingga mengikat secara moral.



29

3. Konsep Perkembangan Moral

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Pakar Psikologi Lawrence Kohlberg sebagaimana dikutip oleh Denhardt (1991, 104-106). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa lo-

gika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Keenam tahapan tersebut dibagi kedalam tiga (3) tingkatan perkembangan moral yang dilalui orang yaitu Prakonvensional, Konvensional dan Pas-konvensional.

Tingkat Prakonvensional

Pada tingkatan ini anak mulai mengembangkan gagasan-gagasan tertentu tentang benar atau salah. Mereka menafsirkan berdasarkan akibat-akibat perbuatan mereka atau kekuasaan fisik orang-orang sekeliling mereka. Tingkatan ini dapat dibagi menjadi dua tahap:

Tahap pertama: Orientasi hukuman dan kepatuhan

Pada tingkat permulaan, gagasan-gagasan itu diasosiasikan dengan hukuman (*punishments*). Sebagai contoh: anak-anak yang mencoret-coret tembok dengan krayon akan dimarahi, untuk menghindari akibat negatif tersebut, maka ia akan menghindari tindakan mencoret-coret tembok tersebut. Artinya, akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk kepada kekuasaan tanpa mempersoalkan-

nya. Jika ia berbuat "baik", hal itu karena anak menilai tindakannya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas.

Tahap kedua: Orientasi Relativis-instrumental

Kemudian anak mulai berperilaku dengan cara tertentu untuk memperoleh hadiah (penghargaan misalnya pujian dari orang tua). Untuk menghindari akibat negatif atau menerima pujian, anak-anak mulai berperilaku dengan cara-cara yang bercirikan sebagai benar. Dari sudut pandang anak tentu saja tidak ada kode moral. Anak hanya akan melakukan hal-hal untuk menghindari hukuman atau mencari pujian. Oleh karena itu pada tingkatan ini akibat perbuatan-perbuatan kita menentukan apakah kita menganggap perbuatan kita benar atau salah. Orientasi prakonvensional ini tentu saja akan kita bawa ke masa dewasa.

Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini orang bertindak secara moral berdasarkan penyesuaian dengan berbagai standar atau konvensi di dalam keluarga, kelompok atau bangsa. Orang berusaha menyesuaikan diri dengan standar-standar moral yang ada dan secara aktif mendukung dan mempertahankannya. Menurut Kohlberg ada dua fase dalam tingkatan konvensional ini yaitu:

Tahap ketiga: Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi “anak manis”

Apa yang disebut dengan anak yang baik atau manis (*Good Boy/Nice Girl*). Dalam hal ini kita menyesuaikan diri dengan harapan-harapan orang tua, guru atau teman sebaya dengan norma-norma yang kita pelajari di rumah, di tempat-tempat ibadah atau di sekolah. Kita mengembangkan aturan-aturan atau kode kode moral, standar tentang benar dan salah, meskipun yang kita anggap sebagai perilaku yang baik sebenarnya hanyalah perilaku sesuai dengan harapan-harapan orang lain.

Tahap keempat: Orientasi hukuman dan ketertiban

Dalam tingkatan konvensional adalah orientasi pada hukum dan ketertiban (*law and order*). Pada fase ini kita mengembangkan orientasi kepada otoritas dan ketertiban sosial. Kita belajar tentang apa sebenarnya seorang warga negara yang baik. Kita mulai menerima pentingnya hidup sesuai dengan aturan-aturan konvensi sosial masyarakat. Pada fase ini pengertian tentang tugas dan kehormatan cenderung mendominasi perspektif moral seseorang. Kita mengetahui bahwa perilaku tertentu salah misalnya berdusta, menyontek dan mencuri, tetapi apabila ditanya mengapa, kita hanya menjawab, karena semua orang tahu perilaku tersebut salah. Kebanyakan orang dewasa tetap berada dalam tingkatan perkembangan moral ini.

Tingkat Pascakonvensional

67
Tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat 'hakekat diri mendahului orang lain' ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. Hanya sedikit orang dewasa yang mencapai tingkatan ini. Pada tingkatan ini, orang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, bukan karena seseorang mengatakan harus demikian, tetapi karena orang tahu, apa yang membuat prinsip-prinsip itu benar. Orang mendefinisikan prinsip-prinsip moral bagi dirinya sendiri dan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut beroperasi secara bebas dari kelompok atau masyarakat. Tingkatan pascakonvensional ini juga dibagi 2 fase yaitu²⁷:

Tahap kelima: Orientasi kontrak sosial Legalitas

Tahap kontrak sosial atau legalistik (*social contract or legalistic*) cenderung bernuansa *utilitarian*. Orang mengakui hak-hak individu lain, termasuk kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan bagaimana masyarakat terbentuk untuk mendukung hak hak itu. Hasilnya adalah pandangan *legalistik*. Pandangan ini mengakui kemungkinan peraturan hukum. Perubahan-perubahan semacam ini sering

Pendahuluan: Apa itu Etika

didukung atas dasar kebaikan yang paling besar untuk paling banyak orang.

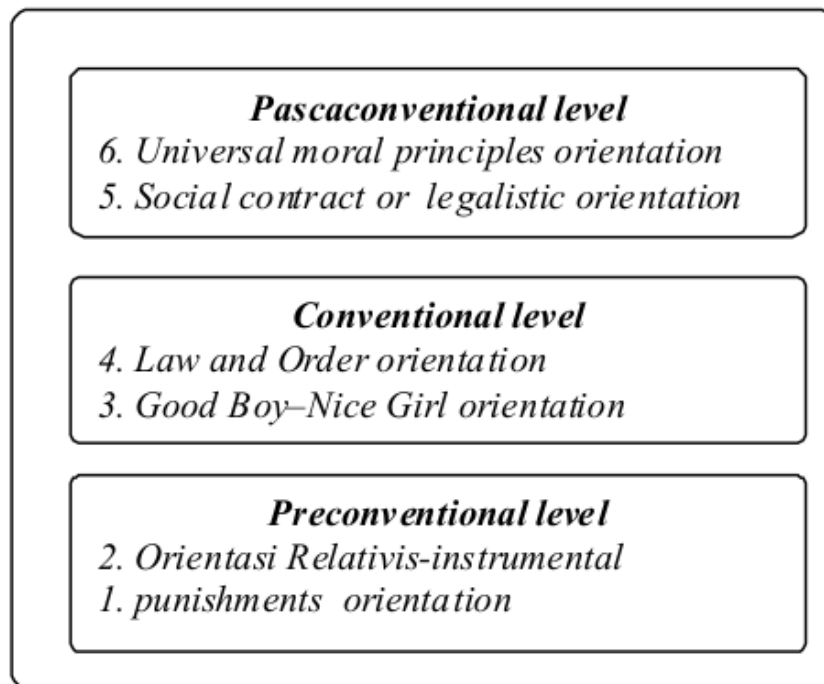
Tahap keenam: Orientasi Prinsip Etika Universal

Fase ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam perkembangan moral. Pada fase ini orang dengan bebas memilih hidup dengan serangkaian prinsip-prinsip moral abstrak tertentu seperti keadilan, persamaan dan penghormatan terhadap martabat orang. Orang memilih mengikuti prinsip-prinsip ini bukan karena penghargaan atau hukuman dan bukan pula untuk memenuhi harapan-harapan orang lain, tetapi karena orang faham mengapa prinsip-prinsip itu harus didukung dan dengan bebas memilih hidup dengan standar-standar, sebenarnya yang diikuti seseorang mungkin sama pada tingkatan kedua maupun ketiga, tetapi ada perbedaan penting dalam alasan mengapa orang menganggap suatu tindakan benar atau salah.

Apabila anda bekerja dalam suatu organisasi publik, anda akan mengetahui bahwa banyak keputusan-keputusan etis yang anda ambil berdasarkan salah satu tingkatan perkembangan moral. Kita melakukan hal-hal tertentu karena hal-hal tersebut akan mendatangkan penghargaan atau hukuman dan kita melakukan hal-hal lain karena kita mentaati hukum-hukum atau standar-standar organisasi. Contoh: anda mungkin mentaati perintah atasan anda agar anda tidak dipecat, atau mungkin anda membeli suatu barang (pengadaan barang inventaris)

lewat proses tender dari pada membeli *melalui* relasi/teman karena memang demikian peraturannya. Tetapi anda juga menghadapi kasus yang memaksa anda harus berfikir lebih hati-hati tentang standar-standar yang akan anda ikuti. Contoh membeli suatu barang (pengadaan barang inventaris) dari seorang relasi/teman *tanpa melalui* sebuah tender Dalam kasus semacam ini penalaran pasca konvensional atau penalaran berprinsip memegang peranan penting.

Secara skematis ketiga tingkatan perkembangan moral beserta fasenya tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Robert .B. Dehnhard : *Public Administration, An Action Orientation* (1991:104-106)

Gambar 1 Tingkat Perkembangan Moral

4. Sifat Nilai Moral: Relativitas/kenisbian

Sebagaimana telah diuraikan bahwa moral atau moralitas merupakan kompleksitas dari nilai-nilai, dan merupakan daya pendorong internal dalam nurani manusia yang senantiasa mengarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Namun demikian nilai-nilai yang ada didalamnya tetap memiliki *kenisbian* atau sering pula disebut sebagai *relativitas* nilai-nilai moral, yang dapat dikelompokkan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara sederhana Nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia, nilai sebagai pendorong utama bagi tindakan manusia dari pelbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas tindakan manusia. Dalam membahas moral sebagai sebuah sistem nilai kita dapat mendasarkan pada pendapat Moore sebagaimana dikutip Kumorotomo (2001,9-12) yang mengelompokkan menjadi 6 macam nilai sebagai berikut:

1. Nilai Primer, Sekunder dan Tersier.

Perbedaan ketiga nilai ini didasarkan pada kerangka berfikir yang menentukan usaha, angan-angan atau kepuasan seseorang. Apabila seseorang sangat mencintai perdamaian dan cenderung untuk selalu bertindak kearah itu, maka orang itu dapat dikatakan memiliki nilai primer. Tetapi jika ia mem-

19

punyai harapan, misalnya menolak untuk menjadi wajib militer atau tentara, maka ia memiliki perdamaian dengan keyakinan bahwa tidak akan ada perang, atau sekedar punya rasa puas bila perdamaian itu terwujud, maka dia hanya memiliki nilai sekunder atau bahkan tersier. Rasa puas atau kesenangan (*pleasure*) dalam hal ini merupakan penilaian yang bersifat sekunder.

2. Nilai Semu dan Nilai Riil

19

Seseorang memiliki nilai semu (*quasi values*) apabila bertindak seolah-olah berpedoman kepada suatu nilai, sedangkan sesungguhnya tidak menganut nilai tersebut. Sebagai contoh: seorang yang membenci perang karena melihat kenyataan bahwa perang mengakibatkan luka, cacat, dan kematian orang lain, tetapi dia tidak sepenuhnya membenci bentuk-bentuk konflik atau kompetisi, sebab masih menyukai pertandingan tinju atau persaingan ekonomis, dalam hal ini dia sekedar memiliki rasa "*humanis*". Pandangan orang ini akan berbeda dengan orang yang benar-benar menginginkan perdamaian. Dengan demikian untuk kasus ini nilai riil (*real values*) berlaku jika orang benar-benar membenci pertikaian dan tidak menginginkan adanya bentrokan atau pertempuran antar manusia. Sedangkan nilai semu berlaku jika seseorang berpendapat bahwa orang tidak boleh bertikai hingga mengakibatkan luka atau kematian, ia masih menerima adanya pertikaian sepanjang tidak mengakibatkan kematian.

Pendahuluan: Apa itu Etika

Bentuk lain dari nilai semu adalah kepura-puraan (*hypocrisy*). Seorang pejabat publik yang bersimpati terhadap pengusuran pedagang kaki lima (PKL) untuk membela kepentingan rakyat kecil, namun tidak melakukan tindakan apapun hanya untuk menarik simpati publik untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan, maka pejabat publik tersebut memiliki nilai semu. Akan tetapi jika ada pejabat publik yang benar-benar menginginkan penyelesaian yang menyeluruh terhadap masalah PKL karena kesadaran sosial, empati dan tanggung-jawabnya, ia dapat dikatakan pejabat publik yang memiliki nilai riil.

3. Nilai Terbuka dan Nilai Tertutup.

Suatu nilai disebut terbuka bilamana tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Sebagai contoh misalnya rakyat Indonesia akan hidup makmur-sejahtera setelah tahun 2020, andaikata cita-cita tersebut tercapai (sesuai dengan nilai yang dianut), tetapi tidak ada jaminan bahwa pada 2021 nanti seluruh rakyat Indonesia akan hidup makmur-sejahtera bilamana terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia. Sedangkan nilai yang tertutup adalah nilai yang memiliki batas waktu. Contoh: dua orang bersaudara masing-masing mempertahankan pendapatnya untuk menguasai warisan orangtuanya; akan tetapi pertikaian tidak akan berlanjut apabila salah satu diantara mereka telah meninggal. Nilai-nilai tertutup akan berhenti

jika lingkup temporalnya sudah terpenuhi, namun nilai-nilai terbuka hanya bisa berhenti untuk sementara waktu saja.

4. Nilai Positif dan Nilai Negatif.

Suatu nilai negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Kebalikan nilai negatif adalah nilai positif. Sebagai contoh kita dapat melihatnya dari moralitas yang punya ciri khas adanya larangan dan anjuran. Walaupun larangan tersebut dapat ditransformasikan ke dalam nasehat dan peringatan, penjabaran tentang moralitas yang terutama untuk melarang atau menghentikan tindakan tertentu tersebut akan menjadi sangat formal. Misalnya larangan “jangan membunuh” dapat ditafsirkan secara positif sebagai “biarkan semua hidup”.

5. Nilai-nilai berdasarkan Orde atau urutannya.

Maka akan terdapat nilai orde pertama (*first order values*) dan nilai orde kedua (*second order values*), atau orde-orde selanjutnya yang lebih tinggi (*higher order values*). Nilai pertama terjadi jika benar-benar tidak ada nilai lainnya. Nilai orde kedua terjadi, jika tidak terdapat nilai lain kecuali nilai orde pertama tadi, demikian seterusnya sampai tidak ada orde nilai yang lebih tinggi lagi. Contoh misalnya ada orang yang bersedia memberikan pengorbanan guna menolong orang lain yang membutuhkannya. Dia menolong bukan berdasarkan *sense of duty* tetapi benar-benar hanya ingin menolong,

maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki orde pertama. Bila kemudian kita memuji tindakannya, berarti kita memasukkan sebuah nilai baru sebab kita mengajukan keinginan agar orang bertindak seperti itu termasuk diri kita sendiri.

6. Nilai Relatif dan Nilai Absolut.

Suatu nilai bersifat relatif bila merujuk kepada orang yang memiliki spesifikasi nilai tersebut. Sebaliknya nilai absolut tidak merujuk pada orang dan dianut secara mutlak. Perbedaan ini berkaitan dengan *egoisme* dalam penilaian. Untuk melihat perbedaan kedua nilai ini dapat diberikan contoh apabila orang melihat sebuah kejadian atau kecelakaan lalu lintas di jalan raya, bila ada orang yang melihat ingin menolong korban kecelakaan tersebut karena menyadari bahwa si korban akan meninggal apabila tidak segera ditolong tanpa melihat siapa korbannya, maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki nilai absolut. Akan tetapi bila seorang ingin menolong melihat dulu siapa korbannya atau dia merasa puas karena ada orang lain yang telah menyelamatkan korban maka orang tersebut memiliki nilai relatif.

5. Karakteristik Nilai Moral

Nilai-nilai moral sebagaimana yang telah diuraikan diatas mempunyai beberapa karakteristik. Adapun karakteristik nilai-nilai moral itu sebagai berikut:

- 1) Primer: Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat (*appetitive basic* yang paling utama sehingga termasuk nilai primer.
- 2) Riil: Nilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatak hipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yang bersangkutan.
- 3) Terbuka: Ciri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup yang terbuka, sebab sekali nilai moral tertutup maka ia akan kehilangan nilai universalitasnya.
- 4) Bisa bersifat positif maupun negatif:
Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan penekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya. Moral bisa berisi larangan-larangan maupun anjuran-anjuran.
- 5) Orde Tinggi atau Arsitektonik:
Nilai-nilai yang ordenya rendah tidak memiliki ciri intrinsik yang menatur nilai-nilai lainnya, suatu pengaturan yang mengatur melibatkan segala macam tindakan lainnya yang penting bagi moralitas, baik berupa ketaatan pada peraturan maupun pedoman-pedoman spritual.
- 6) Absolut
Moralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak relatif.

Pendahuluan: Apa itu Etika

Selanjutnya karakteristik nilai-nilai moral tersebut diatas akan mempengaruhi perilaku manusia. Proses menjelmannya nilai-nilai moral menjadi ukuran-ukuran moral diharapkan akan senantiasa melandasi setiap perilaku manusia, menurut James R. Rest (dalam Widjaja, 199:89) dapat dibagi menjadi 4 komponen utama yaitu:

- 1) Manusia diharapkan mampu untuk menafsirkan situasi dan mengidentifikasi atas suatu masalah moral. Yang dimaksud disini adalah kemampuan individu untuk memprediksi arah tindakan-tindakan yang mungkin dalam suatu situasi serta memperkirakan konsekuensi-konsekuensinya.
- 2) Manusia diharapkan mampu untuk menentukan arah tindakan terbaik yang akan memenuhi suatu ide moral, apa yang semestinya dilakukan dalam situasi yang ada. Secara nyata menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban, formulasi rencana tindakan yang relevan dengan standar moral yang meyangkut konsep-konsep mengenai keadilan, pembenaran moral, ataupun aplikasi norma-norma moral sosial.
- 3) Manusia diharapkan mampu untuk memutuskan tentang apa yang benar-benar dituju dengan membuat pilihan atas nilai-nilai yang berbeda. Motivasi moral yang berlainan disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang berbagai masalah, selanjutnya pemahaman nilai moral yang berbeda juga menghasilkan tindakan yang berbeda atau bahkan bertolak belakang.

- 4) Akhirnya manusia diharapkan mampu melaksanakan suatu rencana tindakan dalam suatu tata urutan yang konkrit serta mampu pula mengatasi rintangan-rintangan yang tak diduga. Proses-proses ini oleh para psikolog disebut kekuatan ego (*ego strength*) atau keterampilan pengaturan diri (*self-regulation skills*)

Keseluruhan tindakan yang berlandaskan nilai-nilai moral diatas pada dasarnya sangat terkait dengan perkembangan jiwa individu (lihat tingkat perkembangan moral) serta interaksinya dengan orang lain. Tinggi rendahnya moralitas individu akan tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan individu yang bersangkutan. Dan keseluruhan sistem nilai yang dimiliki oleh seorang individu membentuk karakter moral individu. Dalam menentukan ukuran-ukuran atau penilaian moral permasalahannya bukan hanya sekedar perasaan, melainkan masalah kebenaran objektif. Bila ada perbedaan pendapat moral, kita tidak berdebat tentang perasaan kita tetapi tentang apa yang secara objektif menjadi kewajiban kita, dan apa yang tidak.

6. Pertimbangan Etis

Haruskah anda mengikuti perintah dari seorang pimpinan, sekalipun anda tahu bahwa yang anda lakukan itu salah?. Haruskah anda melanggar peraturan untuk membantu seorang teman / relasi yang membutuhkan? Haruskah anda berbohong

bahwa yang anda lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Anda dapat membuat pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut diatas dalam daftar yang lebih panjang lagi. Namun tidaklah mudah untuk memberikannya, karena masalah etika itu jarang bersifat hitam-putih.

Agar bertindak secara benar, maka kita harus memilah banyak nilai dan seringkali hal itu berbenturan sesuai yang melatarbelakangi pekerjaan, tetapi kita harus bisa menarik kesimpulan yang masuk akal yang menjadi landasan mengapa kita mengambil tindakan tersebut. Tentu jawabannya tidak cukup hanya mengatakan "*itu tergantung*" sekalipun posisi semacam ini banyak mendapat pengakuan dalam masyarakat kita.

Relativitas Etika atau Moral (*Ethical or Moral Relativism*) merupakan suatu pandangan yang mengatakan bahwa nilai kebenaran suatu tindakan sangat bergantung pada konteksnya yakni secara historis, kultural, situasional dan individu. Jadi menurut pandangan ini tidak ada aturan perilaku universal yang berlaku pada segala macam situasi. Kultur yang berbeda memiliki aturan perilaku yang berbeda pula.

Sebuah kultur mungkin menganggap pantas dan wajar bila orang tua mereka yang telah lanjut usia (manula) dititipkan di panti jompo sehingga mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang besar, sedangkan kultur yang lain menganggap hal tersebut merupakan pelepasan tanggungjawab anak terhadap orang tua. Namun argumen-argumen semacam ini seringkali

tidak mampu menjelaskan prinsip-prinsip moral yang lebih besar dan seragam seperti rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua.

Lebih dari itu pandangan kaum relativis agaknya bertentangan dengan pengalaman moral kita. Ketika kita membuat penilaian bahwa pembunuhan adalah tindakan yang tidak bermoral, kita tidak mengatakan bahwa pembunuhan tidak bermoral bagi sebagian individu dan bermoral bagi sebagian yang lain. Bahkan tidak terbersit pengertian bahwa kita menilai pembunuhan itu tidak bermoral di sejumlah negara dan bermoral di negara lain. Kita menyatakan bahwa pembunuhan tidak bermoral bagi semua orang di segala jaman dan kita dapat mempertahankan pernyataan kita tersebut berdasarkan landasan-landasan rasional maupun emosional. Posisi ini menunjukkan bahwa hanya ada "*satu jawaban yang benar*" atas pertanyaan-pertanyaan moral sekalipun jawaban itu mungkin sulit dicari.

Denhardt (1991;102) dalam bukunya *Public Administration, An Action Orientation* menjelaskan langkah-langkah pertimbangan etis sebagai berikut:

- 1) Kita harus berusaha menjelaskan fakta-fakta (*to clarify the fact*). Meskipun kebanyakan masalah etika melibatkan fakta dan nilai-nilai, dan fakta saja tidak mungkin dapat memecahkan masalah, penting bagi kita untuk menentukan fakta-fakta sejelas mungkin. Contoh: suatu kebijakan pengendalian polusi mungkin memerlukan ukuran-ukuran

yang tepat tentang bahan-bahan polusi yang dilepas di udara. Dengan mengetahui ukuran-ukuran yang tepat dan tidak mengira-ira (spekulasi) saja, kita dapat memecahkan masalah tersebut.

- 2) Untuk memecahkan masalah-masalah etika dengan mudah, maka harus ada suatu kesepakatan/ persetujuan tentang prinsip-prinsip dasar (*basic principles*). Prinsip-prinsip dasar tersebut mungkin berupa standar moral yang luas seperti kebebasan atau keadilan, dapat juga berupa hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diterima masyarakat atau merupakan standar perilaku yang tepat bagi suatu kelompok atau organisasi tertentu. Contoh : Dua orang detektif mungkin mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana memperlakukan penjahat, tetapi apabila mereka menjelaskan persetujuan mereka atas dasar tujuan membasmi kejahatan, mereka akan dapat menyatukan perbedaan mereka.. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kemajuan yang dapat kita buat dalam membentuk suatu landasan bersama atau mencapai suatu kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip dasar akan dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- 3) Salah satu aspek sentral dalam pertimbangan etis adalah analisis tentang argumentasi-argumentasi (*analysis of arguments*) yang disajikan atas dasar pandangan yang bermacam-macam. Argumentasi tersebut dapat dikemuka-

kan oleh individu atau kelompok yang berbeda atau argumentasi-argumentasi kontra yang ada dalam pikiran kita. Dalam kedua hal tersebut kita perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, pembenaran-pembenaran berbagai pandangan, dan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam pembenaran-pembenaran tersebut sepanjang proses argumentasi, dialog sangat membantu dalam menjelaskan posisi seseorang, apabila masalah itu kita pikirkan sendiri, kita memerlukan seseorang untuk diajak membicarakan masalah-masalah tersebut. Pada akhirnya kita perlu mengambil keputusan dan melaksanakannya (*to make a decision and act on it*) Pertimbangan etika tidak hanya mengarahkan kita pada sebuah keputusan, tetapi juga penting bertindak sejalan dengan keputusan itu.

7. Kebenaran Etis

Kebenaran etis adalah kebenaran yang bersumber dari etika. Etika mempelajari prinsip-prinsip dan tindakan moral. Moral berkaitan dengan praktek-praktek dan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan benar dan salah. Jadi kebenaran etis adalah kebenaran yang berdasarkan prinsip-prinsip dan tindakan moral. Dengan berpedoman pada kebenaran etis ini kita dapat menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah dan mengapa tindakan-tindakan itu dianggap benar atau salah.

Pendahuluan: Apa itu Etika

Kebenaran Etis menurut para filsuf meliputi kejujuran, keberanian, dapat dipercaya, keramahtamahan, keadilan dan dapat diandalkan, dengan titik sentral keadilan dan keinginan untuk berbuat baik.

Untuk dapat menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, kita harus memiliki kepekaan yang kuat terhadap nilai-nilai etis tersebut diatas. Kepekaan sebenarnya merupakan keterampilan, dan keterampilan atau kepekaan dapat menjadi kuat apabila dipraktekkan. Oleh karena itu nilai-nilai etis tersebut diatas harus dipraktekkan oleh semua orang sedangkan para administrator publik dan tenaga-tenaga profesional lainnya harus mengaplikasikannya dalam situasi-situasi spesifik yang mereka hadapi selama menjalankan tugas.

Sebagai contoh kebenaran Etis dan Non-Etis. Apabila seseorang pejabat telah menyatakan janji, baik tertulis ataupun lisan maka secara etis pejabat tersebut harus memenuhinya, sebaliknya apabila ia tidak memenuhi janjinya dapat dianggap tidak dapat dipercaya atau tidak etis (non-etis). Begitu juga apabila seorang pegawai yang oleh atasannya diperintahkan untuk mengganti uang pengeluaran dinas yang jumlahnya sudah dibengkakkan (tidak sesuai dengan kenyataannya). Sebagai bawahan mungkin akan mengikuti perintah atasan tersebut, walaupun *kata hatinya* tidak benar, maka disini sebagai bawahan dituntut suatu *keberanian* untuk mengatakan kebenaran bahwa tindakan tersebut salah / tidak etis (non-etis).

BAB II

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan *baik* dan *buruk*, sedangkan administrasi adalah konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (*get the job done*). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi, seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan – gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan hakikat administrasi.

Sejak dasawarsa tahun 1970-an, etika administrasi telah menjadi bidang studi yang berkembang pesat dalam ilmu administrasi¹. Perkembangan ini terutama didorong, meskipun bukan disebabkan semata-mata oleh masalah-masalah yang dihadapi oleh administrasi negara di Amerika karena skandal-

¹ Nicholas Henry (1995) berpandangan bahwa ada tiga perkembangan yang mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi, yaitu (1) hilangnya dikotomi politik administrasi, (2) tampilnya teori-teori pengambilan keputusan di mana masalah perilaku manusia menjadi tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya seperti rasionalitas, efisiensi, (3) berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan, yang disebutnya “*counterculturecritique*”, termasuk di dalamnya dalam kelompok yang dinamakan “Administrasi Negara Baru”.

skandal seperti *Watergate* dan *Iran Contra*. Kajian-kajian tersebut masih berlangsung hingga saat ini, dan masih belum terkristalisasi. Hal ini mencerminkan upaya untuk memantapkan identitas ilmu administrasi, yang sebagai disiplin ilmu yang bersifat eklektik dan terkait erat dengan dunia praktek, tidak dapat tidak terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Meskipun dikatakan demikian, sejak awalnya masalah kebaikan dan keburukan telah menjadi bagian dari bahasan dalam administrasi; walaupun sebagai subdisiplin baru berkembang kemudian. Misalnya, konsep birokrasi dari Weber, dengan konsep hirarkinya dan birokrasi sebagai profesi, mencoba untuk menunjukkan birokrasi yang baik dan benar. Begitu juga upaya Wilson untuk memisahkan politik dari administrasi. Bahkan konsep manajemen ilmiah dari Taylor dapat juga dipandang sebagai upaya ke arah itu. Cooper (1990) bahkan menyatakan bahwa nilai-nilai adalah jiwanya administrasi negara. Frederickson (1994) mengatakan nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi. Jauh sebelum itu Waldo (1948) menyatakan siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai, dan siapa yang mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai.

Peran etika dalam administrasi baru mengambil wujud yang lebih terang, yakni kurang lebih dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Masalah etika ini terutama lebih ditampilkan oleh kenyataan bahwa meskipun kekuasaan ada di tangan

mereka yang memegang kekuasaan politik (*political masters*), ternyata administrasi juga memiliki kewenangan yang secara umum disebut *discretionary power*. Persoalannya sekarang adalah apa jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara “benar” dan tidak secara “salah” atau secara baik dan tidak secara buruk. Banyak pembahasan dalam kepustakaan dan kajian subdisiplin etika administrasi yang merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan itu²

Etika tentunya bukan hanya masalahnya administrasi negara. Ia masalah manusia dan kemanusiaan, dan karena itu sejak lama sudah menjadi bidang studi dari ilmu filsafat dan juga dipelajari dalam semua bidang ilmu sosial. Di bidang administrasi, etika juga tidak terbatas hanya pada administrasi negara, tetapi juga dalam administrasi niaga, yang antara lain disebut sebagai *business ethics*³.

² John A. Rohr menunjukkan dengan jelas melalui ungkapan sebagai berikut: “*Through administrative discretion, bureaucrats participate in the governing process of our society; but to govern in a democratic society without being responsible to the electorate raises a serious ethical question for bureaucrats*”.

³ Oleh karena itu pula bahasan ini tidak dimulai dengan batasan-batasan karena telah banyak kepustakaan yang mengupas etika, moral, moralitas, sehingga pengetahuan mengenai hal itu di sini sudah dianggap “given”. Untuk kepentingan pembahasan di sini diikuti jejak Rohr, pakarnya masalah etika dalam birokrasi, yang menggunakan etika dan moral dalam pengertian yang kurang lebih sama, meskipun untuk kepentingan pembahasan lain, misalnya dari sudut filsafati, memang ada perbedaan. Rohr menyatakan: “*For the most part, I shall use the words “ethics” and “morals” interchangeably. Although there may be nuances and shades of meaning that differentiate these words, they are derived etymologically from Latin and Greek words with the same meaning.*” Kita ketahui dari kepustakaan bahwa kata etika berasal dari Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan atau watak; dan moral, dari kata Latin *mos* (atau *mores* untuk jamak) yang artinya juga kebiasaan atau cara hidup.

etika birokrasi dalam pelayanan publik

ORIGINALITY REPORT

21 %	20 %	1 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	thesis.umy.ac.id Internet Source	1 %
2	nunoentakai.blogspot.com Internet Source	1 %
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
4	xa.yimg.com Internet Source	<1 %
5	jenersus.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	eprints.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
7	akasiusakangadilnegara.blogspot.com Internet Source	<1 %
8	muwafikcenter.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
9	catatanliobijumes16.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	massofa.wordpress.com Internet Source	<1 %

11	www.stiekhad.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.bangindra.net Internet Source	<1 %
13	taufiqurokhman.com Internet Source	<1 %
14	map.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
15	marsudikepri.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	lpidb.ums.ac.id Internet Source	<1 %
17	noviandycandra.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	muwafikcenter.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	www.banyumaskab.go.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
21	kreasiku94.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	siotakmati.blogspot.com Internet Source	<1 %

23	itjen.kemhan.go.id Internet Source	<1 %
24	www.powershow.com Internet Source	<1 %
25	admpublik.undip.ac.id Internet Source	<1 %
26	madaniaonline.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	dgchuank.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
29	fauziegerrard.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	kmplnmakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	ariplie.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	drdeddy pandjisantosa.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	ferirozak.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	wekburoot.blogspot.com Internet Source	<1 %

eprints.umm.ac.id

35

Internet Source

<1 %

36

reviewtesis.blogspot.com

Internet Source

<1 %

37

syamjayananang.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

willygaut.blogspot.com

Internet Source

<1 %

39

eviienurafiani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

fekonunismuh.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

41

news.palcomtech.com

Internet Source

<1 %

42

Christo Vorando Manafe. "Soda Molek: Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang", Jurnal Inovasi Kebijakan, 2019

Publication

<1 %

43

asminiwaode.blogspot.com

Internet Source

<1 %

44

jurnalilmuadministrasinegara.wordpress.com

Internet Source

<1 %

45

mutumanikamhila-hizkilalulu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46	www.iasi-jerman.de Internet Source	<1 %
47	arsipdaerahntt.org Internet Source	<1 %
48	suaibatulaslamiyah.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	ejournal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
50	studypolitic.org Internet Source	<1 %
51	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
52	zadoco.site Internet Source	<1 %
53	theearthagunggeo.blogspot.com Internet Source	<1 %
54	milikadie.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	issuu.com Internet Source	<1 %
56	ejournalwiraraja.com Internet Source	<1 %
57	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %

briyanworld.blogspot.com

58

Internet Source

<1 %

59

www.jurnalscienceindonesia.com

Internet Source

<1 %

60

bidannurblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

61

itjen.kemenag.go.id

Internet Source

<1 %

62

karsa.stainpamekasan.ac.id

Internet Source

<1 %

63

armingsh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

64

fairouzabadyahmad.wordpress.com

Internet Source

<1 %

65

www.bappenas.go.id

Internet Source

<1 %

66

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

67

mezzahafizhah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

68

fr.scribd.com

Internet Source

<1 %

69

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

70

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia

Student Paper

<1 %

71

ardiceper.blogspot.com

Internet Source

<1 %

72

jhanssem.wordpress.com

Internet Source

<1 %

73

mitrachu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

74

digilib.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

75

edoc.site

Internet Source

<1 %

76

rajadariusputra.wordpress.com

Internet Source

<1 %

77

makalahpendidikanagama.blogspot.com

Internet Source

<1 %

78

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

79

usupress.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

80

tahmidmaulana-kmb.blogspot.com

Internet Source

<1 %

81

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1 %

82

lepinuskogoya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

83

documents.mx

Internet Source

<1 %

84

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

85

schooltv.alsen.sch.id

Internet Source

<1 %

86

irwan68.wordpress.com

Internet Source

<1 %

87

freeurblack.wordpress.com

Internet Source

<1 %

88

djalali22.blogspot.com

Internet Source

<1 %

89

najaciesagitariuskadiri.wordpress.com

Internet Source

<1 %

90

ondyx.blogspot.com

Internet Source

<1 %

91

ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

92

ekarahmaaa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

93

edhoo91.blogspot.co.id

Internet Source

<1 %

94

ar.scribd.com

Internet Source

<1 %

95

Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani

Student Paper

<1 %

96

slideplayer.info

Internet Source

<1 %

97

www.yumpu.com

Internet Source

<1 %

98

gardabumi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

99

Joseph Helmick. "Ethics and the Profession of Audiology", Seminars in Hearing, 2008

Publication

<1 %

100

Tulus Santoso, Maya Puspita Dewi. "Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2019

Publication

<1 %

101

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

102

ar.mian.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

103

grasbia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

104

dyah-fitriani.blogspot.com

Internet Source

<1 %

105	www.gitalara.com Internet Source	<1 %
106	cilacapkab.go.id Internet Source	<1 %
107	littleworld84.blogspot.com Internet Source	<1 %
108	www.simpuldemokrasi.com Internet Source	<1 %
109	Mujiarto Mujiarto, Djoko Susanto, Rizki Yudha Bramantyo. "STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KEPUASAN PASIEN DI UPT PUSKESMAS PANDEAN KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019 Publication	<1 %
110	Koppell, Jonathan G. S., and Jennifer Claire Auer. "Is There a Spirit of Governance?", Public Administration Review, 2012. Publication	<1 %
111	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
112	sahrudin-lubis.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	www.itjen.kemenag.go.id Internet Source	<1 %

114	adisetiyo383.blogspot.com Internet Source	<1 %
115	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
116	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
117	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
118	Ade Harsa Suryanegara. "Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2019 Publication	<1 %
119	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
120	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
121	antikorupsi.org Internet Source	<1 %
122	alandacreative.blogspot.com Internet Source	<1 %
123	portal.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
124	124.81.86.182 Internet Source	<1 %

125	novioppie.blogspot.com Internet Source	<1 %
126	makalah-dudi.blogspot.com Internet Source	<1 %
127	perencanaan.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
128	rosyidjuice.blogspot.com Internet Source	<1 %
129	budimansmpempatpml.wordpress.com Internet Source	<1 %
130	www.achluddin.com Internet Source	<1 %
131	dikdas.bantulkab.go.id Internet Source	<1 %
132	abhest.blogspot.com Internet Source	<1 %
133	masroed.wordpress.com Internet Source	<1 %
134	Rachmi Yulianti. "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Penataan Kelembagaan (Studi di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2018 Publication	<1 %
135	Fernandes Simangunsong. "Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen	<1 %

Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat",
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu
Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016

Publication

136	udyaljawi.blogspot.com Internet Source	<1 %
137	de.scribd.com Internet Source	<1 %
138	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
139	222.124.222.229 Internet Source	<1 %
140	Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman. "PERAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
141	abhypunya.blogspot.com Internet Source	<1 %
142	www.negarahukum.com Internet Source	<1 %
143	bpsda-seluna.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
144	www.ditbin-widyaiswara.or.id Internet Source	<1 %

145	pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
146	wimiu.com Internet Source	<1 %
147	kamoenyo.wordpress.com Internet Source	<1 %
148	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
149	blognurhasni.blogspot.com Internet Source	<1 %
150	pangisyarwi.com Internet Source	<1 %
151	lab-ane.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
152	tholearies.blogspot.com Internet Source	<1 %
153	Rosdalina Bukido. "KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012 Publication	<1 %
154	Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %

155	ajielaw.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %
157	ejournal.stiepancasetia.ac.id Internet Source	<1 %
158	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	<1 %
159	basyir46e.blogstudent.mb.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
160	dendy88happy.blogspot.com Internet Source	<1 %
161	Lisheng Dong. "Public Administration Theories", Springer Science and Business Media LLC, 2015 Publication	<1 %
162	jurangpencapaianmatematik.blogspot.com Internet Source	<1 %
163	abdulkadir.blog.uma.ac.id Internet Source	<1 %
164	rodliat.blogspot.com Internet Source	<1 %

contohmakalah.web.id

165	Internet Source	<1 %
166	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
167	Munjin Munjin. "Internalisasi Nilai-nilai Budi Pekerti Pada Anak", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 Publication	<1 %
168	www.pkai.lan.go.id Internet Source	<1 %
169	Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
170	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
171	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
172	Ulang Mangun Sosiawan. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
173	Yeyen Gustriana, Darman Usman. "PENGARUH PEMBELAJARAN ETIKA DAN	<1 %

LINGKUNGAN AKADEMIK TERHADAP
SENSITIVITAS ETIS MAHASISWA
AKUNTANSI", Jurnal Akuntansi, 2019

Publication

174

Submitted to Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On